



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP MERAK

Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026 terdiri dari 3 Sasaran Kinerja dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 110,95%. Secara keseluruhan capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Stasiun PPMHKP Merak yang menyelenggarakan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 12 IKU, sebanyak 5 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 7 belum ada kegiatan IKU atau penilaian dilakukan per semester atau pertahun.

Uraian dan status capaian dari 5 IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel IKU Stasiun PPMHKP Merak yang diukur s.d Triwulan I Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I TAHUN 2026			
				TARGET TW I	REALI- SASI	% CAPAI- AN	NILAI PENYESU- AIAN ATAS CAPAIAN
Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan							
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72	81,33	112,96	112,96
		2	Persentase Hasil Kelautan dan PerikananSektor Produksi Pasca Panen yangMemenuhi Standar Mutu dan KeamananPangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72	70,05	97,29	97,29
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan							
S.03	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasanyang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaLingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	86	100	116,28	116,28
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJyang diumumkan pada SIRUP lingkup UPTStasiun PPMHKP Merak (%)	77	100	120,00	120,00
		5	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPTStasiun PPMHKP Merak (Indeks)	3,50	3,99	114,00	114,00

Realisasi anggaran Stasiun PPMHKP Merak s.d Triwulan I Tahun 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1,861,699,975 atau 19.58% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 9,509,119,000. Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Stasiun PPMHKP Merak agar melakukan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk mencapai kinerja periode berikutnya sampai dengan berakhirnya tahun 2026.

Selain itu komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Stasiun PPMHKP Merak diharapkan dapat mendukung kinerja Stasiun PPMHKP Merak yang lebih baik.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
E. Dasar Pengukuran Kinerja.....	6
F. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	6
G. Ruang Lingkup.....	7
H. Waktu Pengukuran Kinerja	7
I. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	7
J. Sistematika Laporan	7
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak 2020-2026.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	9
C. Penetapan Kinerja Tahun 2026	10
D. Rencana Aksi Pencapaian IKU	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Pengelolaan Kinerja Stasiun PPMHKP Merak.....	13
B. Capaian Kinerja	14
C. Analisa Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	22
D. Analisa Capaian Kinerja Triwulan I TA 2026 terhadap Rencana Capaian Kinerja Tahun 2026.....	22
BAB 4 PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Langkah Perbaikan	23
C. Rekomendasi	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026	10
Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja (PK) Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026. 10	
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	13
Tabel 3. 2 Sasaran Kinerja dan IKU Stasiun PPMHKP Merak yang diukur pada Triwulan I TA 2026.....	14
Tabel 3. 3 Realisasi IK 1 Triwulan I Tahun 2026.....	17
Tabel 3. 4 Realisasi IK 2 Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 3. 5 Realisasi IK 4 Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 3. 6 Realisasi IK 7 Triwulan I Tahun 2026.....	20
Tabel 3. 7 Realisasi SKM Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 3. 8 Realisasi IK 15 Triwulan I Tahun 2026.....	21
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Stasiun PPMHKP Merak Triwulan I TA 2026	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Merak	3
Gambar 2. 1 Peta Strategi Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Merak	9
Gambar 3. 1 Dashboard Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Merak s.d Triwulan I TA 2026.....	15
Gambar 3. 2 Data Dukung Sektor Produksi Primer	17
Gambar 3. 3 rekomendasi hasil pengawasan lingkup SPPMHKP Merak pada website SIDA-KKP	19
Gambar 3. 4 Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2026.....	20

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Merak dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Merak dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Stasiun PPMHKP Merak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Merak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi

stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Merak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Stasiun PPMHKP Merak melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2026 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
3. Undang-Undang Uu Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelauatan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II dan IV di BPPMHKP menjadi Kelompok Kerja sehingga struktur organisasi Stasiun berubah seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Merak

Stasiun PPMHKP Merak mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PPMHKP Merak menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPPMHKP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Merak, Kepala Satker dibantu oleh 3 (tiga) Kelompok Kerja, yaitu:

1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik; serta 10 (sepuluh) Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 (satu) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) , dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun PPMHKP Merak juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Merak dalam perspektif learning and growth.

D. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-PBPPMHP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.

E. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Nomor: SP DIPA- 032.13.2.649688/2026 tanggal 2 Desember 2026.

F. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk :

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Stasiun PPMHP Merak sampai dengan Triwulan I TA 2026 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Stasiun PPMHKP Merak level 2 yang telah disepakati Stasiun PPMHKP Merak dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP.

H. Waktu Pengukuran Kinerja

1. Periode yang dinilai : Januari s.d Maret 2026
2. Waktu pelaksanaan penilaian : April 2026

I. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Stasiun PPMHKP Merak sampai dengan 31 Maret 2026 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2026.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Maret 2026.

J. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra BPPMHKP dan Stasiun PPMHKP Merak, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Stasiun PPMHKP Merak. Capaian Kinerja Triwulan I TA 2026, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I TA 2026; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak 2020-2026

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita ini diimplementasikan dalam delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian di dalam pemerintahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai unit kerja yang berada di lingkungan KKP, maka BPPMHKP turut mendukung Visi Presiden dan Visi KKP tersebut.

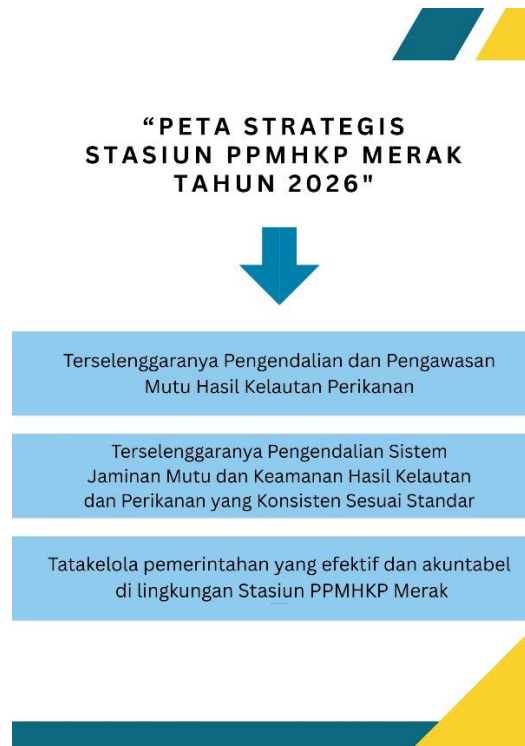
Misi yang diemban oleh BPPMHKP kepada Stasiun PPMHKP Merak untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang .

Tujuan pembangunan Stasiun PPMHKP Merak merupakan penjabaran dari visi dan misi BPPMHKP guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas

BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP telah menetapkan 3 sasaran kinerja yang akan dituju dengan rincian sasaran seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Merak

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan. Penyusunan RENJA 2026 juga telah disesuaikan dengan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 dan juga merujuk pada RPJMN 2025- 2029 dan RENSTRA BPPMHKP Tahun 2025-2029.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada tahun 2026, Stasiun PPMHKP Merak melaksanakan 3 (tiga) program utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 6.591.816.000. Ketiga kegiatan tersebut terdapat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	416.225.000
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	66.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	6.109.591.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026		6.591.816.000

C. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap indikator kinerja pada masing-masing kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2026 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja (PK) Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72

		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Lokasi)	71
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	82,5
		6.	Nilai pembangunan integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	3,5

D. Rencana Aksi Pencapaian IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun PPMHKP Merak telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh

mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap Koordinator di lingkungan Stasiun PPMHKP Merak dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengelolaan Kinerja Stasiun PPMHKP Merak

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Stasiun PPMHKP Merak membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit ingkup Stasiun PPMHKP Merak untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d < 100	Cukup
3.	Merah	< 70	Kurang
4.	Abu Abu	Belum Ada Capaian	
5.	Putih	Belum Input Capaian	

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Stasiun PPMHKP Merak tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya melalui capaian 15 IKU dengan target yang telah ditentukan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan I TA 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun PPMHKP Merak dari bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I TA 2026 untuk Level 2 (Stasiun PPMHKP Merak). Target Sasaran Kinerja dan IKU Stasiun PPMHKP Merak yang diukur sampai dengan Triwulan I TA 2026 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode Januari sampai dengan Maret tahun 2026. Target dan capaian IKU Stasiun PPMHKP Merak Triwulan I TA 2026 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Sasaran Kinerja dan IKU Stasiun PPMHKP Merak yang diukur pada Triwulan I TA 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I TAHUN 2026			
				TARGET TW I	REALI- SASI	% CAPAI- AN	NILAI PENYESU- AIAN ATAS CAPAIAN
Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan							
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72	81,33	112,96	112,96
		2	Persentase Hasil Kelautan dan PerikananSektor Produksi Pasca Panen yangMemenuhi Standar Mutu dan KeamananPangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)	72	70,05	97,29	97,29
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan							
S.03	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasanyang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaLingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	86	100	116,28	116,28
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJyang diumumkan	77	100	120,00	120,00

			pada SIRUP lingkup UPTStasiun PPMHKP Merak (%)				
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPTStasiun PPMHKP Merak (Indeks)	3,50	3,99	114,00	114,00

2 (dua) Sasaran Kinerja dan 5 (lima) IKU yang diukur pada Triwulan I TA 2026 diatas, telah dilakukan pengukurannya baik secara manual maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Beberapa IKU/IK dilakukan pengukuran atau akan diukur pada Triwulan berikutnya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, namun proses pencapaiannya tetap dipantau agar berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat disampaikan kondisi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Merak pada Triwulan I TA 2026 sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Merak s.d Triwulan I TA 2026

Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU Triwulan I mencapai nilai 110,95 termasuk dalam kriteria istimewa (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 12 IKU yang diukur Tahun 2026, 5 IKU telah memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan 7 IKU belum dilakukan pengukuran.

Perlu disampaikan bahwa capaian Sasaran Kinerja dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan Sasaran Kinerja tersebut. Capaian

kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing Sasaran Kinerja dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Sasaran Strategis 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
----------------------------	---

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak

Pada triwulan I tahun 2026, sektor produksi primer lingkup Stasiun PPMHKP Merak menerbitkan 1 sertifikat CBIB dan CPIB, sedangkan 2 untuk sertifikat CPOIB sehingga capaian Indikator Kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak sebesar 112,96%. Adapun sertifikasi primer dapat dilihat pada gambar berikut:

Pencarian Data PB-UMKU

NIB: [Sync with OSS](#)

Propinsi:

[Cari](#) [Reset](#)

Daftar Permohonan PB-UMKU

Permohonan	Perusahaan	Nama Idn	No Registrasi Usaha	Usaha	Propinsi	Kota/Kab	Status Idn	Keterangan	Action
Nomor Permohonan : P-20250915160013473316 Tanggal Permohonan : 2025-09-15 16:03:13	NIB : 2301240036866 Nama Perusahaan : RONGGONG MARS BANTEN	Sertifikasi : Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	202401-2521-0424-0023-070	Pembesaran Crustacea Air Payau	BANTEN	KAB. PANDEGLA NG	PERSETUJUAN PERIZINAN	✓ SPT Terbit ✓ SPT Sudah TTE ✓ Upload Checklist ✓ Persetujuan Checklist ✓ Lampiran Teknis	Libat SPT Libat SPT TTE Libat Laporan Libat Lampiran Teknis

Nomor Perumahan	NIB	Sertifikat Cara	Tanggal Perumahan	Industri Produk	KAB.	PERSETUJUAN	Status
2026021163557173389	8120203890879	Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOB)	2026-02-02 16:35:57	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	BANTEN	KAB. TANJUNGPURA	✓ SPT Sudah TTE ✓ Upload Checklist ✓ Pengetahuan Checklist ✓ Lampiran Teknis
2026012809094607615	8120203890879	Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOB)	2026-01-28 09:09:34	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	BANTEN	KAB. TANJUNGPURA	✗ SPT Belum Terbit ✗ SPT Belum TTE ✗ Upload Checklist ✗ Lampiran Teknis
2026012809094607615	8120203890879	Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOB)	2026-01-28 09:09:34	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	BANTEN	KAB. TANJUNGPURA	✗ SPT Belum Terbit ✗ SPT Belum TTE ✗ Upload Checklist ✗ Lampiran Teknis
20260112150049260188	8120017062375	Pembentukan Ikan yang Baik (CPIB)	2026-01-12 15:00:49	Pembentukan Ikan Air Payau	BANTEN	KAB. PANDEGLA	✗ SPT Belum Terbit ✗ SPT Belum TTE ✗ Upload Checklist ✗ Lampiran Teknis
2026011900570231849	8120017062375	Pembentukan Ikan yang Baik (CPIB)	2026-01-19 08:27:02	Pembentukan Ikan Air Payau	BANTEN	KAB. PANDEGLA	✓ SPT Terbit ✓ SPT Sudah TTE ✓ Upload Checklist ✓ Pengetahuan Checklist ✓ Lampiran Teknis

Gambar 3.2 Data Dukung Sektor Produksi Primer

Formula penghitungan capaian IKU adalah :

$$\%x = \frac{TE\ CBIB + CPIB + CPOIB / CDOIB + CPPIB + CPIB\ Kapal}{5} \times 100\%$$

$$\%x = \frac{88,33 + 90,00 + 88,33 + 70,00 + 70,00 + 81,33}{5} \times 100\%$$

$$\%x = 112,96\%$$

Tabel 3.3 Realisasi IK 1 Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi				2026		Renstra 2020-2029
	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Thd Target	Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak	-	100	100	72	81,33	112,96	72

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak

Terdapat 3 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu: Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/PMMT (HACCP). Adapun persentase dari 3 indikator tersebut

sebagai berikut :

$$\%x = \frac{TE\ HACCP+SKP+SPDI}{3} \times 100\%$$

$$\%x = \frac{73,82\% \ 73,82\% \ 62,50\%}{3} \times 100\%$$

$$\%x = 70,05\%$$

Tabel 3. 4 Realisasi IK 2 Triwulan I Tahun 2026

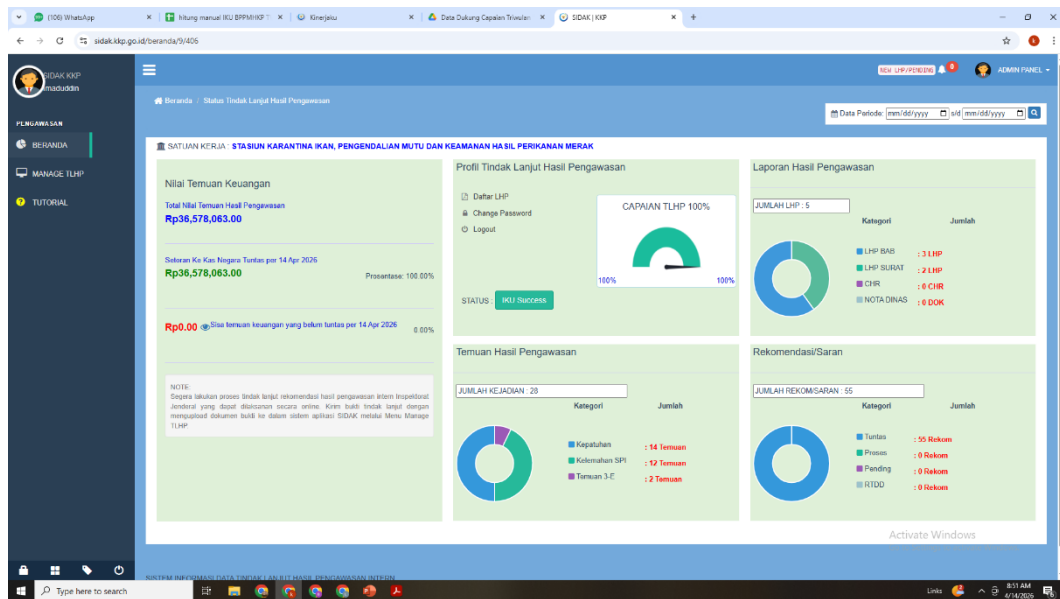
Indikator Kinerja	Realisasi			2026			Renstra 2020-2029
	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Thd Target	Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak	-	100	100	70	70,05	97,29	72

Sasaran Strategis 3	Terselenggaranya pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP
----------------------------	--

IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan.

Capaian Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak sebesar **100%** dari target 86% berdasarkan Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Satker BPPMHKP Tahun 2026. Berikut data dukung untuk rekomendasi hasil pengawasan lingkup SPPMHKP Merak pada website SIDAK-KKP.



Gambar 3.3 rekomendasi hasil pengawasan lingkup SPPMHKP Merak pada website SIDAK-KKP

Tabel 3.5 Realisasi IK 4 Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi			2026			Renstra 2020-2029
	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Thd Target	Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak	100	100	100	86	100	116,28	86

IK 4 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP (10%).
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%).
3. Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) (10%).
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%).

5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%).

6. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023 (15%).

Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar 100 % dari target 77% berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

					MONERJ	Terumumkan	
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Gambar 3.4 Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2026

Tabel 3.6 Realisasi IK 7 Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi			2026			Renstra 2020-2029
	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Thd Target	Target
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	77,01	84,34	100	77	100	120,00	77

IK 5 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2026 adalah 3,50 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP.

Adapun SKIPM Merak mendapatkan nilai SKM yaitu 3,99 yang terdiri dari 43 orang responden. Capaian ini sudah melebihi dari yang ditargetkan oleh BPPMHKP yaitu 3,50.

Tabel 3.7 Realisasi SKM Triwulan I Tahun 2026

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online

Tabel 3.8 Realisasi IK 15 Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi			2026			Renstra 2020-2029
	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Thd Target	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak	91,97	3,58	3,90	3,50	3,99	114,00	3,50

C. Analisa Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran Stasiun PPMHKP Merak s.d Triwulan I TA 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4,182,267,824 Atau 47,13% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 8,874,737,000.

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Stasiun PPMHKP Merak Triwulan I TA 2026

KET	JENIS BELANJA			TOTAL
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU	5,613,834,000	3,895,285,000	0	9,509,119,000
REALISASI	1,160,922,639	700,777,336	0	1,861,699,975
PERSENTASE	20.68%	17.99%	0%	19.58%

D. Analisa Capaian Kinerja Triwulan I TA 2026 terhadap Rencana Capaian Kinerja Tahun 2026

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun PPMHKP telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d.Triwulan I TA 2026 terhadap target kinerja tahun 2026.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 12 IKU, sebanyak 5 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 7 IKU tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan I, tetapi masih dalam kategori hijau (baik).

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun PPMHKP Merak s.d. Triwulan I TA 2026 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Stasiun PPMHKP Merak dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Merak s.d. Triwulan I Tahun 2026 adalah baik, dengan Skor Kinerja sebesar 110,95% atau secara umum capaian kinerja Stasiun PPMHKP Merak di atas target dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Dari hasil evaluasi capaian kinerja 12 IKU, sebanyak 5 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 7 tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan I, tetapi masih dalam kategori hijau (baik).
3. Realisasi anggaran Stasiun PPMHKP Merak s.d Triwulan I Tahun 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1,861,699,975 atau 19.58% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 9,509,119,000.

B. Langkah Perbaikan

Akhirnya, Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Merak Triwulan I TA 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

C. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya serta mempertahankan pencapaian yang telah diraih, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan :

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum menjadi target pada triwulan I, sebagai langkah antisipatif guna menjamin pencapaian target tahunan.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.
3. Dengan pelaksanaan rekomendasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan UPT Stasiun PPMHKP SPPMHKP Merak mampu terus mendorong peningkatan kinerja sekaligus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Dedikasi terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen terhadap inovasi berkesinambungan, akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat mutu pelayanan dan daya saing organisasi ke depan.